



RENCANA KERJA TAHUN 2019



DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BONE



KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan diharapkan menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk terciptanya *Good Governance*.

Salah satu kerangka perencanaan untuk mewujudkan sistem manajemen dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan industri, maka pada setiap tahun anggaran seluruh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran. Secara khusus di lingkungan Dinas Perindustrian, Renja dimaksud merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Prioritas (RIPIN) 2015 – 2035, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2015 – 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian 2015 – 2018, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018.

Untuk mewujudkan sistem manajemen pemerintahan yang baik serta memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, dipandang perlu menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Perindustrian Tahun 2018 sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018.

Watampone, 15 April 2018

Kepala Dinas Perindustrian Kab. Bone,

Drs.A. Aswar

Pangkat : Pembina Utama Muda/ IV.c

Nip. 19581223 198503 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Bab I Pendahuluan.....	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
Bab II Hasil Evaluasi PN Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu.....	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	
Bab III Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah.....	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	
3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	
3.3 Program dan Kegiatan.....	
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	
Bab V Penutup.....	

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah yang berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun perencanaan pembangunan daerah, meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP Nasional;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program PD, lintas PD, program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif ;
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan menjabarkan rencana detail teknis pelaksanaan Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis yang memuat tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Renja-PD merupakan dokumen perencanaan tahunan yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-PD merupakan perencanaan pada unit organisasi terendah yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka anggaran guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang industri daerah.

Renja- PD disusun dengan mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) PD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya serta dinamika permasalahan yang berkembang dan kebutuhan masyarakat. Dalam menyusun Renja-PD perlu ditetapkan pula tujuan, sasaran, indikator kinerja, pagu indikatif, prakiraan maju serta penyelarasan program dan kegiatan sesuai skala prioritas daerah sebagai upaya mensinergikan pencapaian sasaran dan target Renstra PD dan RPJMD tahun yang bersangkutan. Renja- PD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja- PD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra PD) ke dalam rencana, program dan penganggaran tahunan, Renja menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian Renja

dapat dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)- PD.

1. 2. Landasan Hukum

Bahwa penyusunan Renja- PD Dinas Perindustrian Kabupaten Bone mengacu:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone 2005-2025;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 87);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penetapan APBD Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 08);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 81);

1. 3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja- PD Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, antara lain :

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja ini adalah, sbb:

1. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. Mewujudkan visi, misi Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2019.
4. Menyediakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian Tahun 2019.

1. 4. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2017

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pelaksanaan review terhadap hasil evaluasi Renja PD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra PD merupakan kegiatan yang bersifat reguler dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi PD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra PD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra PD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- PD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi sektor publik dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam menyusun program kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Dalam Rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada Tahun 2017 melaksanakan 13 Program dan 33 Kegiatan, meliputi sebagai berikut:

A. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2017

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp.554.850.000,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 539.209.973 ,- dan Realisasi Fisik sebesar 97,18 %, program ini didukung dengan kegiatan :**

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka operasionalisasi kegiatan berupa belanja jasa telepon, internet/wifi dan listrik. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 38.000.000,- Namun yang terealisasi hanya sebesar 71,30%, sebesar Rp. 27.093.042 ,- dengan sisa dana Rp. 10.906.958 ,- dan kita dapat melihat tercapainya kegiatan penyediaan jasa komunikasi dan listrik secara tepat waktu dan lancar serta dapat menunjang kinerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga terciptanya pelayanan yang baik.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 190.150.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan pengelolaan keuangan dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 185.650.000,- (97,63%). Sisa dana Rp. 4.500.000,-.

c. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berupa kebutuhan ATK, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman Aparatur SKPD. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 54.200.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 54.200.000,- (100 %).

d. Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berupa pengadaan bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan meliputi Surat Kabar ,Majalah/Tabloid dan Jasa Publikasi,Dokumentasi dan Iklan Pemerintah. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 10.00.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.10.000.000,- (100 %).

e. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait dan ke perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.249.766.931,- (99,91%). Sisa Dana Rp. 233.069.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran Rp.980.450.000,-dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.944.849.300,- dengan realisasi fisik sebesar 96,08% program ini didukung dengan kegiatan :

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian menganggarkan belanja modal pengadaan kendaraan dinas/operasional berupa pengadaan sepeda motor 2 unit (Roda 2) dengan anggaran sebesar Rp. 34.000.000,- dan dengan indikator menunjang kelancaran tugas dan fungsi aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.32.755.000,- (96,34 %)

b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan belanja modal pengadaan perlengkapan kantor berupa pengadaan brankas 1 unit dan sound system 1 unit dengan anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan dengan indikator menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 15.000.000,- (100 %)

c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan belanja modal pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan genset 1 unit, mesin absensi 1 unit, computer PC 1 unit,note book 1 unit, printer 3 unit, kulkas 1 unit, dispenser 1 unit, dan proyektor 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.92.500.000,- dan dengan indikator menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.92.500.000,- (100 %)

d. Pengadaan Mebeleur

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan belanja modal pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan meja kerja 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.7.000.000,- dan dengan indikator menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.7.000.000,- (100 %)

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Untuk menunjang kenyamanan aktivitas perkantoran maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 190.000.000,- dengan indikator terpeliharanya bangunan gedung Dinas Perindustrian dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 190.000.000 ,- (100%)

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas kantor/dinas dalam rangka operasionalisasi kegiatan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 116.950.000,- indikator yang dapat dilihat adalah terpeliharanya kondisi kendaraan operasional melalui penggantian suku cadang,service kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan secara berkala tepat waktu dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 94.208.300 ,-(80,55%) Sisa dana sebesar Rp. 22.741.700,- .

g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Untuk pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor berupa belanja jasa service alat elektronik, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 25.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 15.855.000- (63,42%). Sisa Dana Rp. 9.145.000,-.

h. Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

Untuk pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor berupa belanja gedung kantor , maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi anggaranRp. 497.531.000, - (99.51 %).

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program ini didukung dengan kegiatan ***Pendidikan dan Pelatihan Formal*** berupa mengikuti Bimtek 8 orang di Makassar, maka Dinas Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp. 65.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.720.00,- atau sebesar 88.80% .

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.40.830.000,-dengan realisasi anggaran Rp.40.830.000,- dan realisasi fisik 100%

Program ini didukung dengan kegiatan ***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*** berupa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Penggandaan serta tersusunnya dokumen berupa DPA,DPPA, RKA, Lakip, Renja, LPPD.Laporan SIRUP dan SIMBADA, maka Dinas Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp. 40.830.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 40.830.000,- atau sebesar 100 % .

5. Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.000.000,-dengan realisasi anggaran Rp.30.000.000,- dan realisasi fisik 100%

Program ini didukung dengan kegiatan ***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi*** berupa pengadaan Website Dinas Perindustrian dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- atau sebesar 100 % .

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan anggaran sebesar Rp.158.175.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 158.175.000,- dan realisasi fisik 100 % program ini didukung kegiatan :

a. Kegiatan Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan. Dengan anggaran Rp. 89.660.000,- Realisasi per 29 Desember 2017 sebesar Rp. 89.659.929,- (100%). Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya

pendataan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pertambangan sehingga tidak adanya PETI yang dilakukan oleh masyarakat.

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Dengan Anggaran sebesar Rp. 530.130.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 470.476.995,- dan realisasi fisik sebesar 94,70% yang didukung oleh kegiatan :

a. Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah.

Kegiatan **pengembangan SDM Industri Kecil Menengah Pandai Besi**, dengan capaian terlaksananya penyuluhan industry kecil pandai besi yang dilaksanakan di Kecamatan Awangpone pada 20 pengrajin industry pandai besi n 2 angkatan dengan anggaran Rp. 57.990.000,- (100%). Kegiatan **pengembangan SDM Industri Kecil Menengah Pengolahan Aren/Enau**, dengan capaian terlaksananya pelatihan industry kecil pengolahan aren/enau yang dilaksanakan di Kecamatan Awangpone pada 20 pengrajin industry dengan anggaran Rp. 79.620.000,- (100%). Kegiatan **pengembangan SDM Industri Kecil Menengah Pengolahan Kopi**, dengan capaian terlaksananya penyuluhan industry kecil pengolahan kopi yang dilaksanakan di Kecamatan Bontocani pada 20 pengrajin industry dengan anggaran Rp. 45.700.00,- (100%). Pelatihan dimaksudkan untuk membekali dan memberikan kemampuan berupa pengetahuan dan penambahan wawasan serta sebagai motivasi dalam rangka pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga (*Home Industri*). Potensi yang sangat besar ini biasa memunculkan wirausaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

b. Pengembangan dan Promosi Potensi Industri Lokal dan Energi Sumber Daya Mineral.

Dalam rangka mempromosikan serta menginformasikan sebagai produk kerajinan nasional daerah dan produk ekonomi kreatif Nusantara dan hasil kerajinan rakyat, produk local, produk unggulan dari berbagai kabupaten se prov. Sul – Sel dan Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan industri dan energy sumber daya mineral melalui pameran Bone Fair, Sul –Sel Expo, Dekranasda dan Kerajinan Nusantara (KRINAYU) dengan anggaran Rp. 286.500.000,- realisasi anggaran Rp. 226.846.995,- (79,18%). Hasil yang dicapai meningkatnya minat investor menanamkan saham di Kabupaten Bone.

c. Pemutahiran Data Industri

Kegiatan Pemutahiran Data Industri ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pencatatan atas jumlah Industri Usaha Kecil Menengah (IKM) 5 Kecamatan (Ulaweng, Ajangale, Awangpone, Cina dan Barebbo) di Kabupaten Bone dalam periode tahun 2017, sehingga data-data mengenai industri IKM di kecamatan tersebut dapat tertata dengan rapi dan mudah dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan di sektor industri oleh para perumus kebijakan dan perencanaan daerah ketika membuat skala prioritas. Dengan anggaran Rp. 60.320.000,- realisasi anggaran Rp. 60.320.000,- (100%). Hasil yang dicapai yaitu jumlah IKM yang aktif 2.239 Unit dan jumlah tenaga kerja 1.074 orang.

- 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 5.300.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.294.974.600,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 99,91 %, sisa Dana Rp. 5.025.400,- dengan dukungan kegiatan :**

a. Pembinaan Dan Pengembangan Energi Terbarukan

Pada kegiatan pembinaan dan pengembangan energy terbarukan. Sasaran program adalah Meningkatnya sarana listrik pedesaan dan pemanfaatan energy alternative dengan hasil yang dicapai Pada Tahun 2017 kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan berupa pengadaan dan pemeliharaan Lampu LED berbasis Smart System 500 titik/pasang tersebar di Kecamatan/Kota. Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energy terbarukan khususnya terpeliharanya penggunaan penerangan jalan umum LED berbasis Smart System. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati PJU dan berbagai manfaat lainnya. Dengan Anggaran sebesar Rp. 5.300.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.294.974.600,- Realisasi fisik 99,91%.

- 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 141.250.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 141.113.654,- dan realisasi fisik sebesar 99,81% dengan dukungan kegiatan :**

a. Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Tata Niaga BBM dan Elpiji

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menertibkan pelaku usaha di sektor BBM dan Elpiji serta mengawasi pendistribusian BBM dan Elpiji dalam rangka menghindari dan mengatasi kelangkaan yang kemungkinan bisa terjadi setiap saat tergantung dari pasokan dari agen dan tingkat kebutuhan masyarakat. Indikator keberhasilan lain dari kegiatan ini adalah meningkatnya PAD dari usaha BBM Non Inti, disamping itu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola usaha yang legal. Dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 74.689.000,- dan realisasi anggaran (99,99 %). Jumlah rekomendasi yang diterbitkan sebanyak 146 rekomendasi.

b. Ketahanan Bahan Bakar Gas (BBG)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa bantuan isi ulang gas elpiji sebanyak 100 tabung gas kepada masyarakat di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tellu siattinge Desa Lappa'e sebanyak 30 tabung gas elpiji 3 kg/set kompor sedangkan di Desa Poleonro sebanyak 50 tabung gas elpiji 3 Kg/set kompor. Kecamatan Sibulue 20 tabung gas elpiji 3 kg / set kompor, akibat pengaruh kelangkaan hal ini disebabkan karena pemasokan dari agen mengalami pengurangan sedangkan kebutuhan justru semakin meningkat. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan sebesar Rp. 66.550.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 66.424.654,- (99,81%), sehingga masyarakat yang tidak mampu akan terbantu dengan adanya kegiatan ini.

10. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.189.690.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 731.772.745,- dan realisasi fisik sebesar 61,50% dengan dukungan kegiatan :

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri hasil dicapai 1 sentra IKM logam di Kecamatan Awangpone Desa Lappoase, Dengan alokasi anggaran yaitu Rp.1.030.000.000,- dan realisasi Rp. 572.158.250,- realisasi keuangan (55,55%), sedangkan realisasi fisik mencapai 100%. Sisa anggaran Rp. 457.841.750,-.

b. Pengembangan SDM Industri Kerajinan

Pengembangan SDM Industri Kerajinan Batuan di Bandung sebanyak 10 pengrajin batuan ,dengan pelaksanaan pelatihan pengolahan batuan maka

wawasan para pengrajin batuan lokal meningkat, yang mana selama ini pengolahan batuan hanya terfokus pada pembuatan batu permata, kini pengolahan batuan sudah semakin kreatif seperti pembuatan aksesoris dan lain – lain. Kegiatan ini dianggarkan sebanyak Rp. 159.690.000,- dengan realisasi Rp. 159.914.495,- (99,95%).

11. Program Pengawasan Sarana dan Prasarana Industri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- dan realisasi fisik sebesar 100% dengan dukungan kegiatan :

- a. Pengawasan Kelayakan Sarana dan Prasarana Industri*, dengan anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- atau 100%. Hasil yang dicapai yaitu terdatanya jumlah Depot air minum yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 37 unit.

12. Program Intensifikasi Pendataan Asli Daerah Sektor Pertambangan, Mata Air dan Air Tanah dengan anggaran sebesar Rp. 52.735.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.732.500,- dan realisasi fisik 99,99%, sisa dana Rp. 2.500,-.

- a. Penyusunan Perbub Perolehan Nilai Air Tanah*, dengan anggaran sebesar Rp. 52.735.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 52.732.500,- atau 99,99%. Hasil yang dicapai yaitu terciptanya peraturan bupati (Perbub) tentang perolehan air tanah.

13. Program Pemetaan Geologi dengan anggaran sebesar Rp. 298.105.000,-dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 298.050.000,- dan realisasi fisik 99,98%, sisa dana Rp. 55.000,-.

- a. Pemetaan Potensi Bencana Alam Pergerakan Tanah Longsor*, dengan anggaran sebesar Rp. 107.705.000,- dan capain realisasi anggaran sebesar Rp. 107.650.000,- atau (99,95%) sisa dana Rp. 55.000,-. Hasil yang dicapai yaitu tersedianya peta daerah rawan bencana alam pergerakan tanah longsor.
- b. Pemetaan Potensi Bahan Galian Non logam dan Mineral Industri*, dengan anggaran sebesar Rp. 190.400.000,- dan capain realisasi anggaran sebesar Rp. 190.400.000,- atau (100%). Hasil yang dicapai yaitu terciptanya pendataan

atau pemetaan di 6 (Enam) Kecamatan dalam pengambilan 20 sample potensi mineral lempung sebagai bahan baku industry.

Dalam Rangka mencapai visi dan misi serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada Tahun 2018 melaksanakan 13 Program dan 28 Kegiatan, yaitu :

B. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2018 Anggaran Berjalan

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan alokasi anggaran Rp.498.856.000,- Dengan Realisasi Anggaran Rp. 125.489.761 , - dan Realisasi Fisik sebesar 24,16 %, program ini didukung dengan kegiatan :**

a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka operasionalisasi kegiatan berupa belanja jasa telepon, internet/wifi dan listrik. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 37.000.000,- Namun yang terealisasi hanya sebesar 21,43%, sebesar Rp. 7.930.329 , - dengan sisa dana Rp. 29.069.671 , - dan kita dapat melihat tercapainya kegiatan penyediaan jasa komunikasi dan listrik secara tepat waktu dan lancar serta dapat menunjang kinerja aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga terciptanya pelayanan yang baik.

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 231.936.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan pengelolaan keuangan dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 50.986.532,- (21,98%). Sisa dana Rp. 180.949.468,-.

f. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berupa kebutuhan ATK, Cetak, Penggandaan, Makanan dan Minuman Aparatur SKPD. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 54.920.000,- indikator yang

dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan administrasi perkantoran dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 13.470.500,- (24.53 %).Sisa Dana Rp. 41.449.500,-.

g. Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berupa pengadaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan meliputi Surat Kabar ,Majalah/Tabloid dan Jasa Publikasi,Dokumentasi dan Iklan Pemerintah. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 10.00.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.2.220.000,- (22.20 %).

h. Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dalam rangka koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait dan ke perusahaan yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.49.768.400,- (31.11%). Sisa Dana Rp. 110.231.600.

i. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone berupa belanja bahan dan perlengkapan pembersih kantor. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 5.000.000,- indikator yang dapat dilihat adalah tercapainya kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan lancar dan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp.1.114.000,- (22.28%). Sisa Dana Rp. 3.886.000.

2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan alokasi anggaran Rp.196.809.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp.82.210.720,- dengan realisasi fisik sebesar 41.77% program ini didukung dengan kegiatan :

a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan belanja modal pengadaan perlengkapan kantor berupa pengadaan brankas 3 Buah Lemari dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- dan dengan indikator menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 6.000.000,- (100 %).

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan belanja modal pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan Komputer 1 unit, Laptop 1 unit, dan printer 1 unit dengan anggaran sebesar Rp.29.800.000,- dan dengan indikator menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.29.800.000,- (100 %)

c. Pengadaan Mebeleur

Untuk menunjang kegiatan sarana dan prasarana aparatur, Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan belanja modal pengadaan peralatan kantor berupa pengadaan meja kerja 3 buah, kursi kerja 3 buah dan kursi rapat 10 buah dengan anggaran sebesar Rp.17.450.000,- dan dengan indikator menunjang peningkatan kinerja aparatur dengan pencapaian realisasi sebesar Rp.17.450.000,- (100 %).

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Untuk menunjang kenyamanan aktivitas perkantoran maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan kegiatan pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor sebesar Rp. 32.759.000,- dengan indikator terpeliharanya bangunan gedung Dinas Perindustrian dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.635.000 ,- (4,99%)

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas kantor/dinas dalam rangka operasionalisasi kegiatan pada Dinas Perindustrian Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp. 98.800.000,-

indikator yang dapat dilihat adalah terpeliharanya kondisi kendaraan operasional melalui penggantian suku cadang, service kendaraan dan surat tanda nomor kendaraan secara berkala tepat waktu dengan pencapaian realisasi anggaran sebesar Rp. 24.325.720 ,-(24.62%) Sisa dana sebesar Rp. 74.474.280,- .

f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Untuk pemeliharaan rutin/Berkala Peralatan gedung kantor berupa belanja jasa service alat elektronik, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 3.000.000,- (25%). Sisa Dana Rp. 9.000.000,-.

3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur

Program ini didukung dengan kegiatan ***Pendidikan dan Pelatihan Formal*** berupa mengikuti Bimtek 4 orang di Makassar, maka Dinas Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp. 42.320.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.00,- atau sebesar 0%

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 27.620.000,-dengan realisasi anggaran Rp.6.630.000,- dan realisasi fisik 24%

Program ini didukung dengan kegiatan ***Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*** berupa Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Belanja Penggandaan serta tersusunnya dokumen berupa DPA,DPPA, RKA, Lakip, Renja, LPPD.Laporan SIRUP dan SIMBADA, maka Dinas Perindustrian mengalokasikan anggaran Rp. 27.620.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 6.630.000,- atau sebesar 24 % .

5. Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-dengan realisasi anggaran Rp. 00,- dan realisasi fisik 0%

Program ini didukung dengan kegiatan ***Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi*** berupa pengadaan Website Dinas Perindustrian dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 00,- atau sebesar 0 % .

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan dengan anggaran sebesar Rp. 58.050.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 10.858.000,- dan realisasi fisik 18.70 % program ini didukung kegiatan :

a. *Kegiatan Pendataan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Usaha Pertambangan.* Dengan anggaran Rp. 58.050.000,- Realisasi per Maret 2018 sebesar Rp. 10.858.000,- (18.70%). Hasil yang dicapai yaitu terlaksananya pendataan, pengawasan dan pengendalian pada kegiatan pertambangan sehingga tidak adanya PETI yang dilakukan oleh masyarakat.

7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah. Dengan Anggaran sebesar Rp. 375.565.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.003.500,- dan realisasi fisik sebesar 6.59% yang didukung oleh kegiatan :

a. *Pengembangan Revitalisasi sentra IKM*

Kegiatan ini merupakan kegiatan retensi /utang yang baru dianggarkan tahun 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 82.045.000,-.

b. *Pengembangan SDM Industri Kecil Menengah.*

Kegiatan **pengembangan SDM Industri Kecil Menengah Pengolahan Gula Merah**, dengan capaian belum terlaksananya penyuluhan industry kecil gula merah yang akan dilaksanakan di Kecamatan Awangpone pada 20 pengrajin industry pengolahan gula merah dengan anggaran Rp. 58.540.000,- (0%). Pelatihan dimaksudkan untuk membekali dan memberikan kemampuan berupa pengetahuan dan penambahan wawasan serta sebagai motivasi dalam rangka pengembangan industri kecil menengah dan industri rumah tangga (*Home Industri*). Potensi yang sangat besar ini biasa memunculkan wirausaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga.

c. *Pengembangan dan Promosi Potensi Industri Lokal dan Energi Sumber Daya Mineral.*

Dalam rangka mempromosikan serta menginformasikan sebagai produk kerajinan nasional daerah dan produk ekonomi kreatif Nusantara dan hasil kerajinan rakyat, produk local, produk unggulan dari berbagai kabupaten se prov. Sul – Sel dan Nusantara. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengembangan industri dan energy sumber daya mineral melalui pameran dengan anggaran Rp. 187.720.000,- realisasi anggaran Rp. 7.410.000,- (3.95%). Hasil yang dicapai meningkatnya minat investor menanamkan saham di Kabupaten Bone.

d. Pemutahiran Data Industri

Kegiatan Pemutahiran Data Industri ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pencatatan atas jumlah Industri Usaha Kecil Menengah (IKM) 5 Kecamatan di Kabupaten Bone dalam periode tahun 2018, sehingga data-data mengenai industri IKM di kecamatan tersebut dapat tertata dengan rapi dan mudah dimanfaatkan untuk keperluan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengembangan di sektor industri oleh para perumus kebijakan dan perencanaan daerah ketika membuat skala prioritas. Dengan anggaran Rp. 47.260.000,- realisasi anggaran Rp. 10.593.500,- (22.42%).

- 8. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan dengan anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 538.000.000,- dengan realisasi fisik kegiatan sebesar 26.79 %, sisa Dana Rp. 2.262.000.000,- dengan dukungan kegiatan :**

a. Pembinaan Dan Pengembangan Energi Terbarukan

Pada kegiatan pembinaan dan pengembangan energy terbarukan. Sasaran program adalah Meningkatnya sarana listrik pedesaan dan pemanfaatan energy alternative dengan hasil yang dicapai Pada Tahun 2018 kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Energi Terbarukan berupa pengadaan dan pemeliharaan Lampu LED berbasis Smart System 224 titik/pasang tersebar di Kecamatan/Kota. Merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan energy terbarukan khususnya terpeliharanya penggunaan penerangan jalan umum LED berbasis Smart System. Sehingga masyarakat tetap bisa menikmati PJU dan berbagai manfaat lainnya. Dengan Anggaran sebesar Rp. 2.800.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 538.000.000,- Realisasi fisik 26.79%.

- 9. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Migas dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 116.700.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.205.000,- dan realisasi fisik sebesar 19.30% dengan dukungan kegiatan :**

a. Penertiban dan Pengawasan Pengendalian Tata Niaga BBM dan Elpiji

Kegiatan ini dimaksudkan untuk menertibkan pelaku usaha di sektor BBM dan Elpiji serta mengawasi pendistribusian BBM dan Elpiji dalam rangka menghindari dan mengatasi kelangkaan yang kemungkinan bisa terjadi setiap saat tergantung dari pasokan dari agen dan tingkat kebutuhan masyarakat. Indikator keberhasilan lain dari kegiatan ini adalah meningkatnya PAD dari usaha BBM Non Inti, disamping itu meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola usaha yang legal. Dengan alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah Rp. 56.950.000,- dan realisasi anggaran (19.30 %). Jumlah rekomendasi yang diterbitkan sebanyak --- rekomendasi.

b. Ketahanan Bahan Bakar Gas (BBG)

Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa bantuan isi ulang gas elpiji sebanyak 100 tabung gas kepada masyarakat di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Tellu siattinge dan Kecamatan T.Riattang Barat, akibat pengaruh kelangkaan hal ini disebabkan karena pemasokan dari agen mengalami pengurangan sedangkan kebutuhan justru semakin meningkat. Dinas Perindustrian Kabupaten Bone menganggarkan sebesar Rp. 59.750.000,-. Dengan realisasi sebesar Rp. 00,- (0%), sehingga masyarakat yang tidak mampu akan terbantu dengan adanya kegiatan ini.

10. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 457.626.750,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 00,- dan realisasi fisik sebesar 0% dengan dukungan kegiatan :

a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri

Kegiatan ini merupakan Kegiatan Lanjutan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri hasil dicapai 1 sentra IKM logam di Kecamatan Awangpone Desa Lappoase, Dengan alokasi anggaran yaitu Rp.457.626.750,- dan realisasi Rp. 00,- realisasi keuangan (0%).

11. Program Pengembangan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 47.150.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 10.149.800,- dan realisasi fisik sebesar 21.53% dengan dukungan kegiatan :

- a. Pengawasan Kelayakan Sarana dan Prasarana Industri*, dengan anggaran sebesar Rp. 57.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.150.000,- atau 21.53%. Hasil yang dicapai yaitu terdatanya jumlah Depot air minum yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 17 DAM.

12. Program Penataan Struktur Industri, dengan anggaran sebesar Rp. 41.800.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 00,- dan realisasi fisik 0%.

- a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Industri (Bantuan Peralatan Mesin Jahit)*, dengan anggaran sebesar Rp. 41.800.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 00,- atau 0%. Belum ada Hasil yang dicapai.

13. Program Pemetaan Geologi dengan anggaran sebesar Rp. 141.175.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 11.736.950,- dan realisasi fisik 20.22%, sisa dana Rp. 129.438.050,-.

- a. Pemetaan Topografi*, dengan anggaran sebesar Rp. 70.025.000,- dan belum ada capain realisasi anggaran sebesar Rp. 00,- atau (0%). Belum ada Hasil yang dicapai.
- b. Pemetaan Kondisi Industri*, dengan anggaran sebesar Rp. 71.150.000,- dan capain realisasi anggaran sebesar Rp. 11.736.950,- atau (22.22%). Belum ada Hasil yang dicapai.

Tingkat efektifitas dan efisiensi kinerja program kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2013-2018

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, dapat diketahui dengan melakukan analisa dengan metode SWOT, yaitu :

2.2.1. Strength (kekuatan)

1. Memiliki kewenangan di Bidang Industri dan ESDM.
2. Melaksanakan perumusan kebijakan di Bidang Industri dan ESDM.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri dan ESDM.

2.2.2. Weaknes (kelemahan)

1. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berlaku efektif tanggal 2 oktober 2014 tentang kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) maka pada tahun 2015 Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam hal Dinas Perindustrian Kabupaten Bone tidak lagi bisa menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atau IUP hanya saja pemerintah Provinsi sulawesi selatan melalui surat permintaan rekomendasi ke kabupaten sebagai syarat untuk menerbitkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jadi sifatnya pemerintah kabupaten hanya membantu proses penerbitannya dan bisa dianggap tidak ada lagi kewenangan dalam hal ini.
2. Diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan pada tahun anggaran berjalan dan tidak dibarengi dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas sehingga menyulitkan dalam pemahaman dan implementasi;
3. Masih adanya beberapa pegawai yang kurang memiliki kepedulian, memahami etos kerja dan tanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone serta masih kurangnya disiplin kerja;
4. Belum optimalnya kesempatan peningkatan pendidikan formal/ informal yang disebabkan kompleksitas bidang industri dan ESDM, ritme dan intensitas pekerjaan yang relatif tinggi;
5. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai tim teknis Industri dan ESDM serta terbatasnya kesempatan

pegawai untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan wawasan, utamanya di bidang Industri dan ESDM.

2.2.3. Opportunity (peluang)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 87);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang industri, maka Dinas Perindustrian Kabupaten Bone diharapkan dapat lebih aktif dalam melakukan pendataan, pembinaan ,pendampingan serta pengawasan kepada Pelaku IKM dan Pengusaha Tambang yang ada di Kabupaten Bone.
4. Belum termanaftatkannya kemitraan dalam pengembangan usaha IKM .
5. Adanya pasar bebas merupakan peluang dalam rangka memasarkan produk IKM .
6. Adanya kebijakan dan anggaran dari kementerian perindustrian dalam pengembangan IKM.
7. Era pasar bebas membuka peluang sector Industri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditi yang memiliki peluang ekspor;
8. Pasar terbuka luas dengan perkembangan dunia usaha;
9. Kemudahan membangun jejaring dan kerjasama sehingga menambah pasar komoditi yang diperdagangkan;
10. Berkembangnya teknologi informasi dan dapat memudahkan berkembangnya Industri Kabupaten Bone;
11. Perkembangan Teknologi Industri dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai Tambah dan berdaya saing.
12. Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang lebih luas dalam mengatur bidang industry dan esdm.

2.2.4. Treath (tantangan),

1. Banyaknya PNS yang memasuki Masa Purna Pensiun (MPP) atau yang sudah pensiun sehingga ada beberapa jabatan kosong seperti Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kasubag. Oleh karena itu, untuk kedepan diperlukan adanya

tambahan PNS baru yang memiliki dedikasi, loyalitas, kualitas dan kompetensi yang tinggi sesuai latar belakang pendidikannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone;

2. Rendahnya kontribusi dan laju pertumbuhan di sector Industri pengolahan dan Energi Sumber Daya Mineral, dengan kontribusi terhadap PDRB yang masih dibawah standar atau kecil merupakan pekerjaan rumah bagi pemangku jabatan serta seluruh pegawai yang ada di Dinas Perindustrian Kabupaten Bone dituntut agar lebih memperhatikan tugas dan fungsinya masing-masing agar kontribusi Terhadap PDRB di Bidang Industri dan ESDM dapat meningkat.
3. Luasnya daerah binaan dan banyaknya daerah binaan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat di bidang perindustrian mengenai manfaat tertib ukur.
5. Adanya pasar bebas yang menyebabkan semakin terbukanya barang dari luar negeri ke Kabupaten Bone. Belum siapnya IKM dalam produk yang dihasilkan menyebabkan terbukanya pasar bebas sebagai tantangan.
6. Ada kecenderungan masyarakat menggunakan produk branded (dari luar).
7. Budaya masyarakat untuk berwirausaha masih kecil.
8. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha dan konsumen dalam mewujudkan konsumen cerdas.
9. Masih kurangnya pemahaman dan ketrampilan pelaku usaha dalam berproduksi bersih (pengelolaan pencemaran akibat industri).
10. Belum semua produk makanan yang dihasilkan oleh IKM memiliki ijin dari BPOM.
11. Belum semua produk label dan kemasan yang representatif dikarenakan kurangnya pemahaman sehingga kurang berdaya saing dengan produk luar.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten

Bone

Isu – isu atau permasalahan – permasalahan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Kabupaten Bone beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang, situasi dan kondisi baik dari lingkungan internal maupun eksternalnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya layanan pemerintahan terutama dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, dan bermutu.
2. Belum optimalnya manajemen data dan informasi dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan
3. Belum optimalnya pemahaman aparatur dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5. Anggaran yang terbatas
6. Kurangnya jumlah SDM dibandingkan dengan industri yang dibina
7. Masih ada daerah yang memiliki potensi IKM yang belum dibina dengan optimal (147 desa)
8. Rendahnya kontribusi perindustrian dalam PDRB
9. Masih kurangnya ketrampilan (produksi, manajemen, teknologi dan akses permodalan) pelaku usaha (IKM) tentang pengelolaan usaha
10. Masih kurang networkning dalam pembinaan
11. Masih kurangnya permodalan dan infrastruktur pendukung usaha
12. Masih kurangnya cakupan dan volume pembinaan pada IKM
13. Rendahnya minat masyarakat untuk menjadi wirasusahawan
14. Masih adanya ketergantungan terhadap bahan baku, penolong dan kemasan yang cukup tinggi;
15. Masih terbatasnya dan kurangnya kemampuan manajemen produksi dan pemasaran
16. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan belum berjalan optimal;
17. Kurangnya wawasan pengusaha IKM baik dari segi manajemen, kewirausahaan maupun dalam mempromosikan produk IKM;

Permasalahan tersebut terjadi karena faktor – faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Jumlah dan kualifikasi SDM aparat
2. Kondisi geografis dan luas wilayah Kab. Bone
3. Sarana distribusi masih terbatas
4. Rendahnya kualitas SDM pelaku usaha
5. Kondisi masyarakat yang masih dilatarbelakangi budaya agraris
6. Pengelolaan industry belum dikelola secara profesional
7. Terbatasnya pembiayaan dalam mendukung aktivitas
8. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwira usaha
9. Terbatasnya pasilitas teknologi produksi
10. Kurangnya modal usaha
11. Kecenderungan penggunaan/mengkonsumsi produk luar

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah tentang perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, misalnya rumusan program dan kegiatan baru yang terdapat dirancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan sudah sesuai namun besarannya berbeda. Penjelasan tersebut dapat diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone untuk perencanaan program dan kegiatan tahun 2018 melakukan pengumpulan usulan program dan kegiatan masyarakat karena menjalankan kegiatan yang bersifat teknis.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGLATAN

3. 1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan Nasional dan sumber daya yang ada, maka perlu disusun Program Pembangunan Nasional (Propenas). Propenas merupakan rencana induk pembangunan perencanaan nasional hasil konsensus dan komitmen bersama masyarakat Indonesia yang memuat pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan demikian, fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah pemerintahan daerah di seluruh Indonesia dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan.

Untuk mendorong pelaksanaan fungsi tersebut perlu adanya desentralisasi di bidang industri dan esdm yang memungkinkan daerah dapat melaksanakan kewenangannya dengan tetap menjamin stabilitas ekonomi makro, yang terintegrasi dengan kebijakan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya anggaran pemerintah daerah yang dapat menunjang tugas-tugas desentralisasinya, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Sebagai penjabaran kebijakan program nasional dan untuk mensinergikan pelaksanaan program pembangunan daerah Pemerintah Kota Bone menyusun Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan mengacu kepada Propenas dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Berdasarkan kedua hal tersebut, untuk mewujudkan keselarasan antara kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, masing-masing Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Program Pembangunan Daerah (Propeda), walaupun dimungkinkan adanya perbedaan prioritas menurut kebutuhan daerah dengan pendekatan bersifat strategis dengan tujuan mewujudkan pemerintahan yang baik, memperkuat landasan pembangunan yang adil dan berkelanjutan serta meningkatkan pembangunan daerah. Untuk program kegiatan di daerah terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi terhadap kebijakan nasional, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Identifikasi Kebijakan Nasional

No.	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	APBN	
2	Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah	APBN	
3	Kapasitas Keuangan Daerah	APBN	
4	Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	APBN	

Dari keempat kebijakan tersebut, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, maka dalam menyusun program kegiatannya Dinas Perindustrian Kabupaten Bone mengacu pada kebijakan nasional “Peningkatan Kerjasama Antar Daerah”, sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja- Dinas Perindustrian pada tahun- tahun sebelumnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan didasarkan pada visi, misi dan memperhatikan dinamika kebutuhan masyarakat serta isu-isu yang berkembang. Tujuan juga harus dapat menunjukkan suatu kondisi riil dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan akan semakin terarah dalam rangka mendukung terealisasinya misi suatu organisasi.


Dengan memperhatikan uraian diatas dan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas serta efisiensi pelaksanaan pengelolaan di Bidang Industri dan ESDM, maka perlu ditetapkan tujuan yang bersinergi dengan Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, antara lain:

- ❖ MISI 3 dalam RPJMD yaitu : **Mengembangkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan kelestarian lingkungan.**


Tujuan :

1. Meningkatkan investasi, pengembangan industri, koperasi UMKM, perdagangan dan pariwisata untuk mengurangi pengangguran.
2. Meningkatkan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pelestarian hutan dan lingkungan hidup.

3.3 Program dan Kegiatan

 **Program** adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinir dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dan Kegiatan kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, yaitu :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
6. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
7. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
8. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
9. Program Penataan Struktur Industri
10. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
11. Program Perencanaan pembangunan Daerah
12. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
13. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
14. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha MIGAS
15. Program Pembinaan dan Pengembangan Kegeologian dan Air Tanah
16. Program Pemetaan Geologi.

 **Kegiatan** adalah merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Secara keseluruhan alokasi anggaran untuk program kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone pada Tahun Anggaran 2019 mengajukan usulan anggaran sebesar Rp. 14.156.500.000,00,- terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp.1.733.442.200,00 dipergunakan untuk belanja gaji dan tunjangan PNS Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, tunjangan daerah dan iuran Askes PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone.
2. Belanja Langsung sebesar Rp. 14.156.500.000,00 sebagaimana tabel 3.3.
Dari keseluruhan alokasi anggaran Belanja Langsung dapat dilihat pada table 3.4.

Tabel.3.3
Rencana Belanja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.733.442.200,00	10.90
2	Belanja Langsusng	14.156.500.000,00	89.1
	JUMLAH	15.889.942.200,00	100.00

Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kebijakan umum sesuai dengan Permendagri 86 tahun 2017 berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih yang selanjutnya ditentukan program pembangunan daerah dan ditetapkan indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan atas pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam rangka mencapai visi jangka menengah Kabupaten Bone. Rencana kerja dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan unit kerja ditunjukkan pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Kerangka Pendanaan Dinas Perindustrian Kabupaten Bone

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja PD Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah tahunan daerah yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018.

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur, yang selanjutnya akan dikompilasikan di tingkat Pemerintah Daerah menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Bone.

Keberhasilan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Bone Tahun 2019 ini diharapkan peran dan tanggungjawab semua pihak dalam hal seluruh pegawai Dinas Perindustrian Kabupaten Bone agar memiliki satu persepsi tentang Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal dan maksimal.

Watampone, 15 April 2018

**KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BONE**

Drs. A. ASWAR

Pangkat : Pembina Utama Muda/IV.c

Nip :19581223 198503 1 006

